

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/ 49 /DPKL
TANGGAL 5 DESEMBER 2013
PERIHAL
LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

**CONTOH
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
DAN
DOKUMEN PERIZINAN LPIP**



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	i
A	Penjelasan Struktur Kepemilikan LPIP.....	A-1
A.1	Contoh Kepemilikan Saham BHI dalam LPIP.....	A-1
A.2	Contoh Kepemilikan Maksimal oleh Pihak Asing dalam LPIP.....	A-3
A.3	Contoh Kepemilikan Maksimal 1 (satu) Pihak dalam LPIP	A-6
B	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian LPIP.....	B-1
C	Contoh Surat Permohonan Izin Usaha LPIP.....	C-1
D	Contoh Laporan Penambahan Modal Disetor LPIP.....	D-1
E	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham LPIP.....	E-1
F	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP.....	F-1
G	Contoh Perhitungan Biaya Perolehan Data.....	G-1
H	Format Penyampaian Laporan.....	H-1
H.1	Contoh Surat Penyampaian Laporan Bulanan.....	H-1
H.2	Contoh Surat Penyampaian Laporan Semesteran.....	H-3
H.3	Contoh Surat Penyampaian Laporan Tahunan.....	H-4
H.4	Contoh Surat Penyampaian Laporan Bisnis Tahunan.....	H-5
I	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha.....	I-1
J	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha.....	J-1

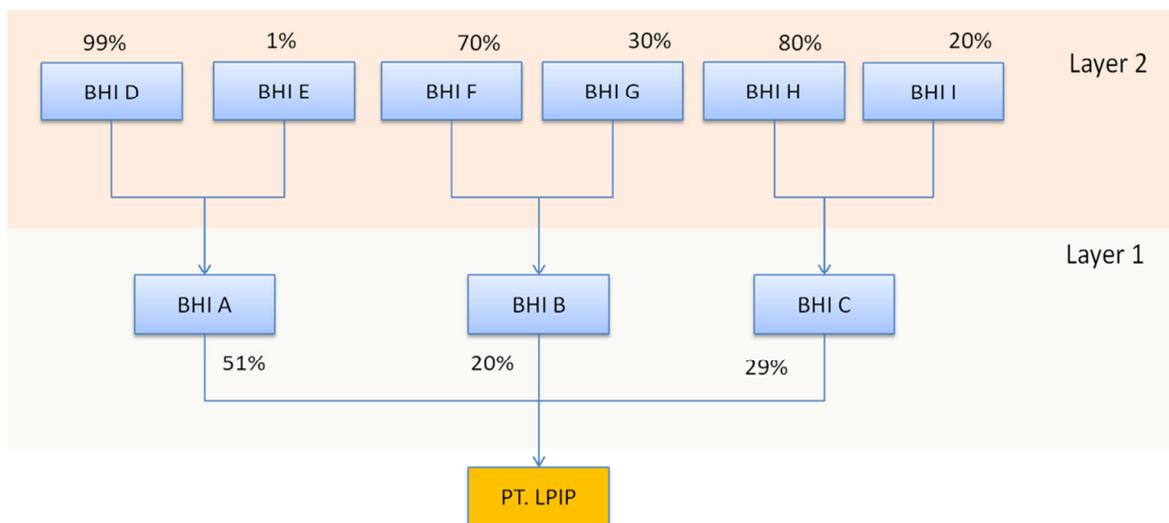
A. Penjelasan Struktur Kepemilikan LPIP

Daftar Singkatan

1. BHI : Badan Hukum Indonesia
2. BHA : Badan Hukum Asing
3. LPIP : Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

A.1. Contoh Kepemilikan Saham BHI pada LPIP

Ilustrasi A.1.1

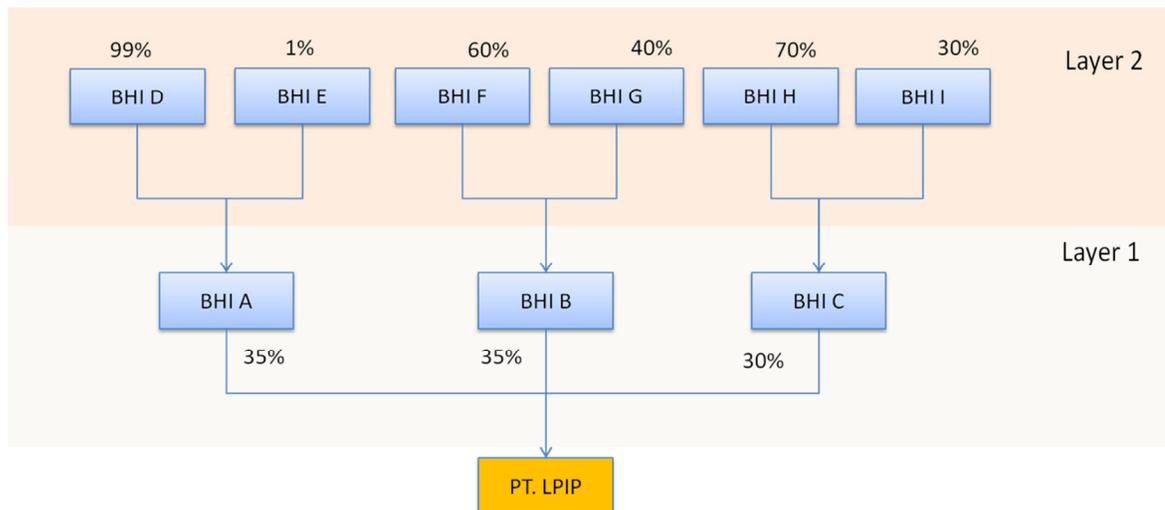


Ilustrasi A.1.1 menggambarkan struktur kepemilikan saham PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. LPIP dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yaitu BHI A, BHI B, dan BHI C, tanpa ada keterkaitan kepemilikan antar BHI dan tanpa ada kepemilikan oleh pihak asing.

Sehingga kepemilikan maksimal untuk 1 (satu) pihak dalam PT. LPIP adalah 51%.

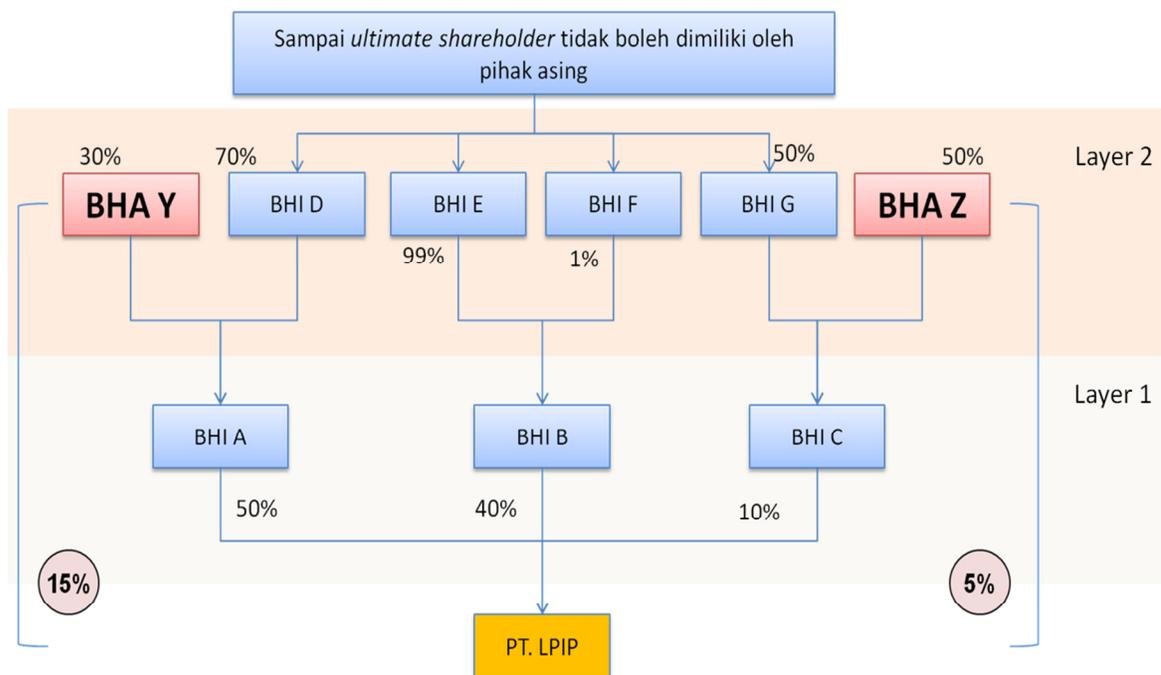
Ilustrasi A.1.2



Ilustrasi A.1.2 menggambarkan struktur kepemilikan saham PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. LPIP dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yaitu BHI A, BHI B, dan BHI C, tanpa ada keterkaitan kepemilikan antar BHI dan tanpa ada kepemilikan oleh pihak asing. Namun tidak terdapat pihak yang memiliki saham sebesar batas maksimal kepemilikan saham yang ditentukan, yaitu 51%.

A.2. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh Pihak Asing dalam LPIP

Ilustrasi A.2.1:

Ilustrasi A.2.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP di *layer 2*, yaitu BHA Y melalui BHI A, dan BHA Z melalui BHI C.

2. Besar kepemilikan pihak asing (BHA Y dan BHA Z) adalah:

a. BHA Y = (% kepemilikan BHA Y di BHI A dikali % kepemilikan BHI A di PT. LPIP)
 $= 30\% \times 50\%$
 $= 15\%$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 15%;

b. BHA Z = (% kepemilikan BHA Z di BHI C dikali % kepemilikan BHI C di PT. LPIP)
 $= 50\% \times 10\%$
 $= 5\%$

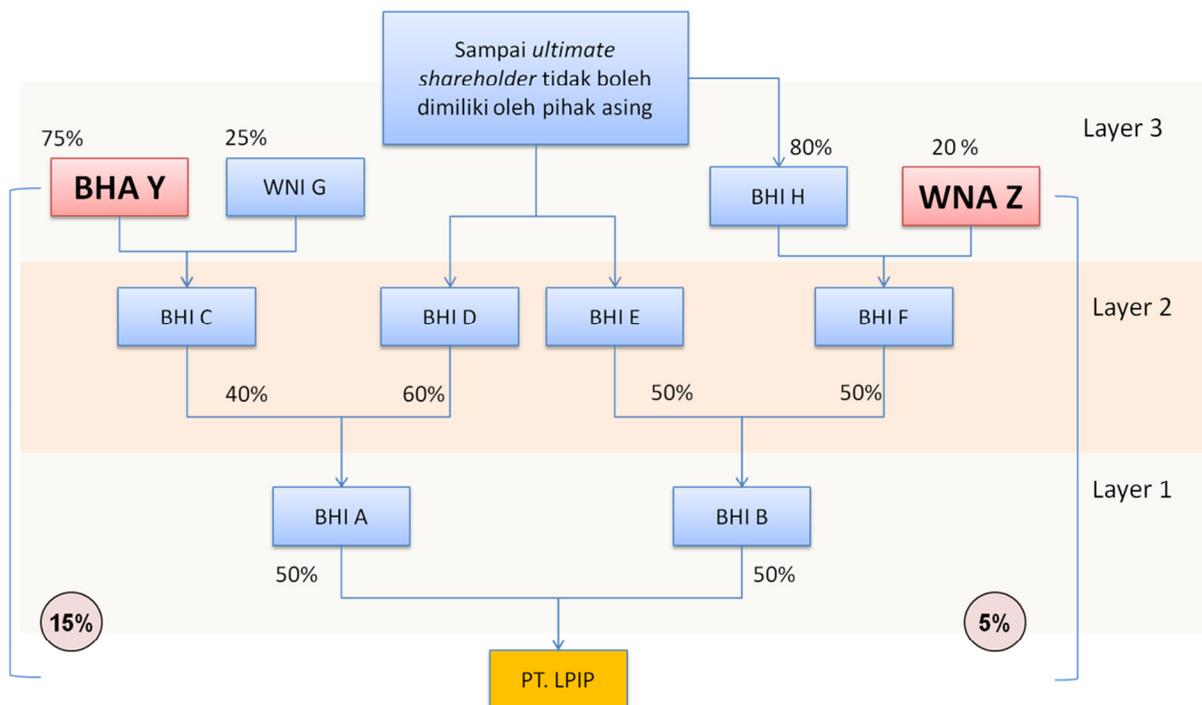
Kepemilikan BHA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan pihak asing melalui BHA Y dan BHA Z di PT. LPIP adalah 20%.

3. Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI D, BHI E, BHI F, BHI G) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

Ilustrasi A.2.2 . . .

Ilustrasi A.2.2:



Ilustrasi A.2.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP pada *layer* 3, yaitu BHA Y dan WNA Z.

2. Besar kepemilikan pihak asing (BHA Y dan WNA Z) adalah:

a. BHA Y = (% kepemilikan BHA Y di BHI C dikali % kepemilikan BHI C di BHI A dikali % kepemilikan BHI A di PT. LPIP)

$$= 75\% \times 40\% \times 50\%$$

$$= 15\%$$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 15%;

b. WNA Z = (% kepemilikan WNA Z di BHI F dikali % kepemilikan BHI F di BHI B dikali % kepemilikan BHI B di PT. LPIP)

$$= 20\% \times 50\% \times 50\%$$

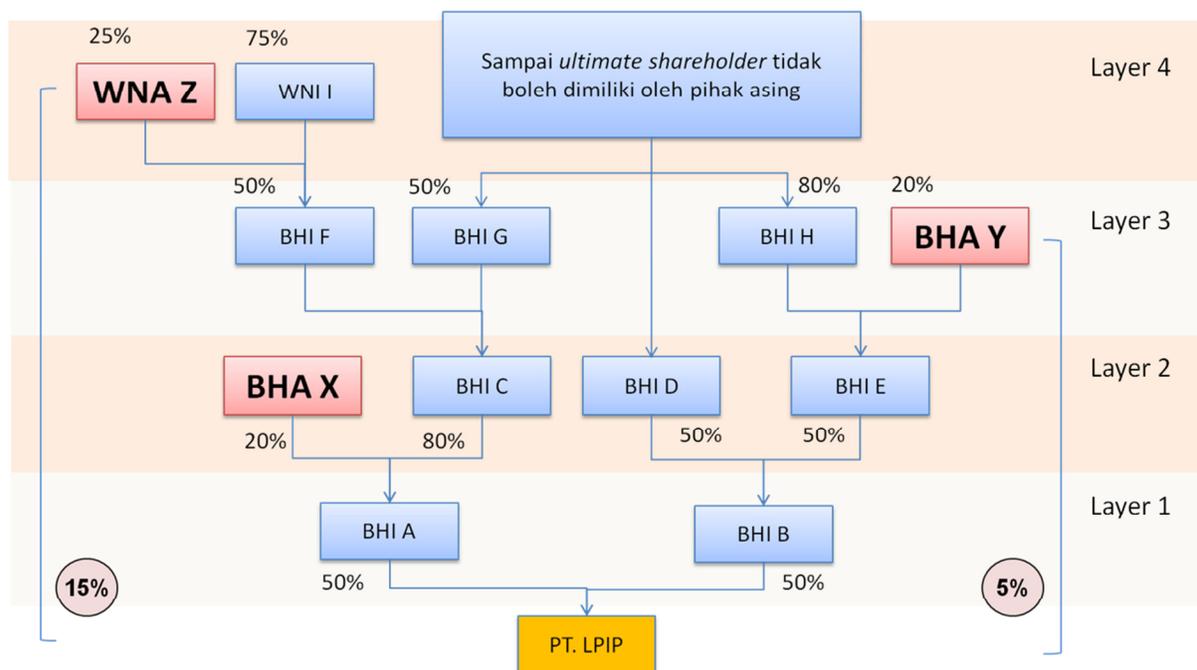
$$= 5\%$$

Kepemilikan WNA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan pihak asing melalui BHA Y dan WNA Z di PT. LPIP adalah 20%.

3. Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI D, BHI E, BHI H) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

Ilustrasi A.2.3



Ilustrasi A.2.3 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP yaitu BHA X pada *layer 2*, BHA Y pada *layer 3*, dan WNA Z pada *layer 4*.

2. Besar kepemilikan pihak asing (BHA X, BHA Y, dan WNA Z) adalah:

$$\begin{aligned} \text{a. BHA X} &= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI A dikali } \% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \\ &= 20\% \times 50\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah 10%;

$$\begin{aligned} \text{b. BHA Y} &= (\% \text{ kepemilikan BHA Y di BHI E dikali } \% \text{ kepemilikan BHI E di BHI B dikali } \% \text{ kepemilikan BHI B di PT. LPIP}) \\ &= 20\% \times 50\% \times 50\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 5%;

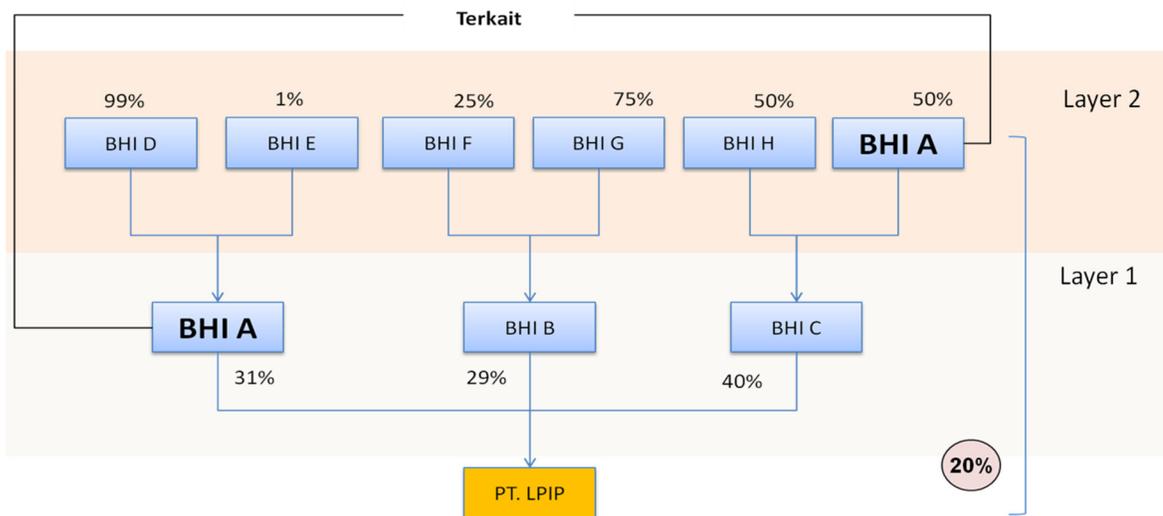
$$\begin{aligned} \text{c. WNA Z} &= (\% \text{ kepemilikan WNA Z di BHI F dikali } \% \text{ kepemilikan BHI F di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan BHI C di BHI A dikali } \% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \\ &= 25\% \times 50\% \times 80\% \times 50\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Kepemilikan WNA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan BHA X, BHA Y dan WNA Z di PT. LPIP adalah 20%.

3. Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI D, BHI G, BHI H) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

A.3. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada 1 (satu) LPIP

Ilustrasi A.3.1

Ilustrasi A.3.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) pihak yaitu: BHI A yang merupakan pemegang saham PT. LPIP (di *layer 1*) dan juga merupakan pemilik PT. LPIP melalui BHI C (di *layer 2*). Kepemilikan BHI A pada PT. LPIP maksimal adalah 51%.

2. Besar kepemilikan BHI A pada PT. LPIP adalah:

$$\begin{aligned} \text{BHI A} &= (\% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \text{ ditambah} \\ &\quad (\% \text{ kepemilikan BHI A di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan} \\ &\quad \text{BHI C di PT. LPIP}) \\ &= 31\% + (50\% \times 40\%) \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHI A pada PT. LPIP adalah 51%.

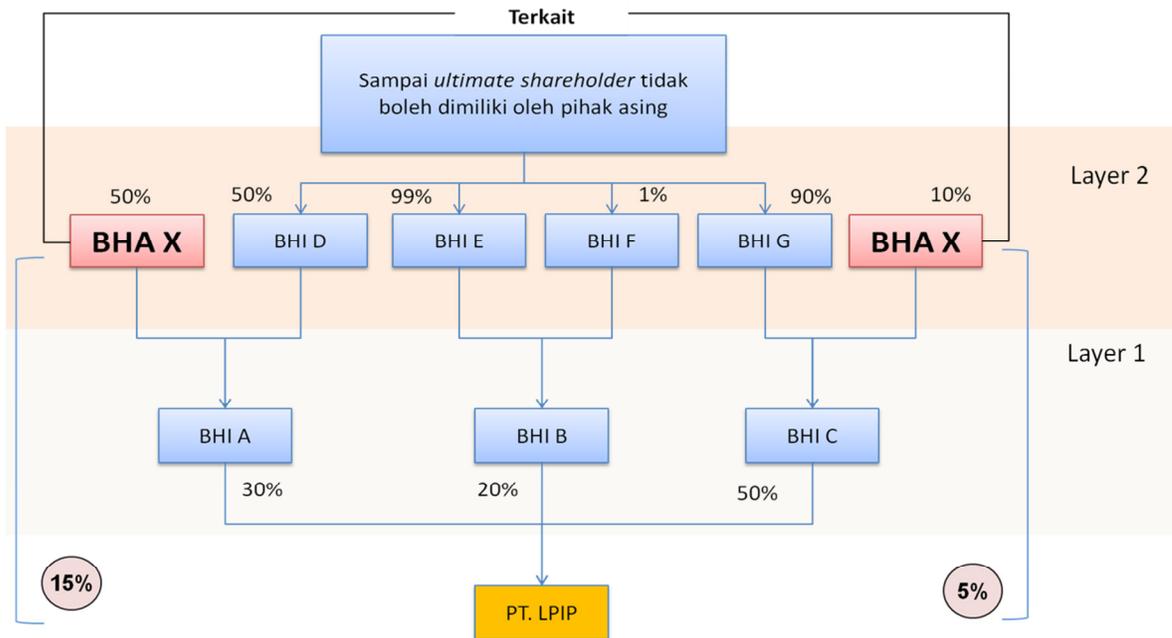
3. Total kepemilikan BHI A pada PT. LPIP telah mencapai batas maksimal (51%), maka BHI A tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP.

4. Perhitungan kepemilikan maksimal 1 (satu) pihak pada 1 (satu) LPIP, berlaku juga untuk posisi pada *layer* lainnya. Contohnya adalah kepemilikan BHI D di PT. LPIP sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHI D} &= (\% \text{ kepemilikan BHI D (layer 2) di BHI A (layer 1) dikali } \% \\ &\quad \text{kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \text{ ditambah} \\ &\quad (\% \text{ kepemilikan BHI D (layer 3) di BHI A (layer 2) dikali } \% \\ &\quad \text{kepemilikan BHI A (layer 2) di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan} \\ &\quad \text{BHI C di PT. LPIP}) \\ &= (99\% \times 31\%) + (99\% \times 50\% \times 40\%) \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHI D pada PT. LPIP adalah 50%.

Ilustrasi A.3.2



Ilustrasi A.3.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) pihak asing, yaitu: BHA X sebagai pemilik PT. LPIP melalui BHI A dan BHI C (di *layer* 2). Besar kepemilikan BHA X pada PT. LPIP maksimal adalah 20%.
2. Besar kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah:
 - a. Kepemilikan BHA X melalui BHI A

$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI A}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP})$$

$$= 50\% \times 30\%$$

$$= 15\%$$
 - b. Kepemilikan BHA X melalui BHI C

$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI C}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI C di PT. LPIP})$$

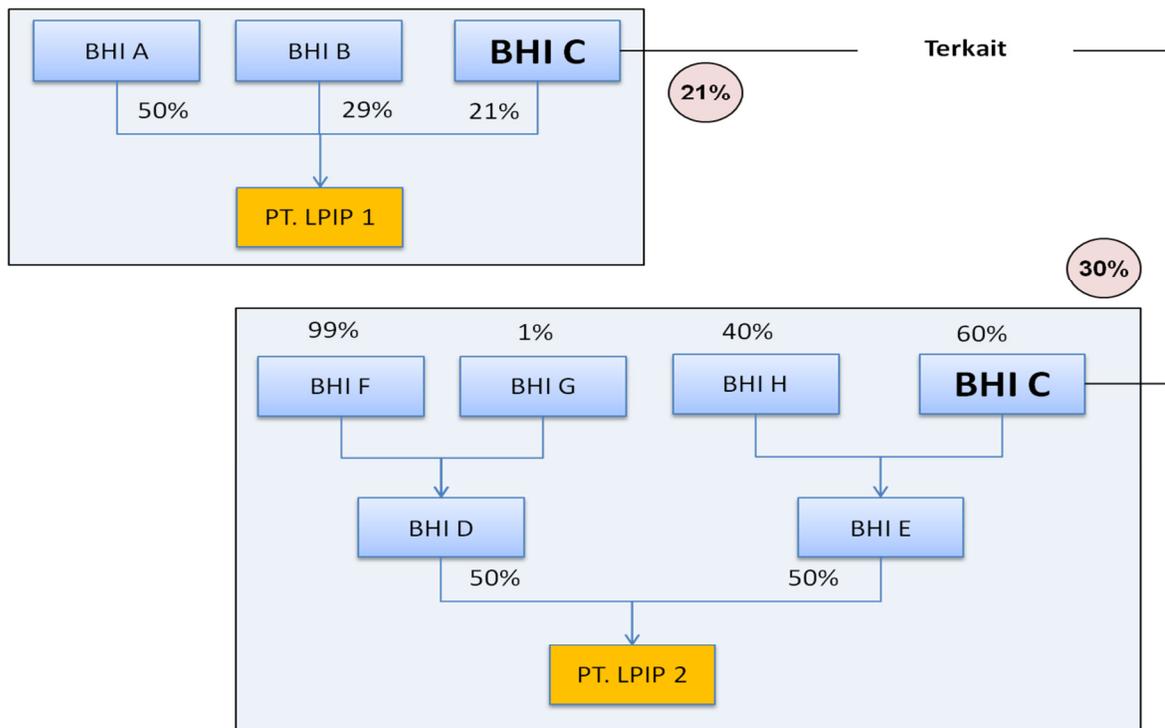
$$= 10\% \times 50\%$$

$$= 5\%$$

Total kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah 20%.
3. Total kepemilikan BHA X telah mencapai batas maksimal (20%), maka BHA X tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP.
4. Perhitungan kepemilikan maksimal 1 (satu) pihak pada 1 (satu) LPIP, berlaku juga untuk posisi pada *layer* lainnya.

A.4. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada beberapa LPIP

Ilustrasi A.4.1



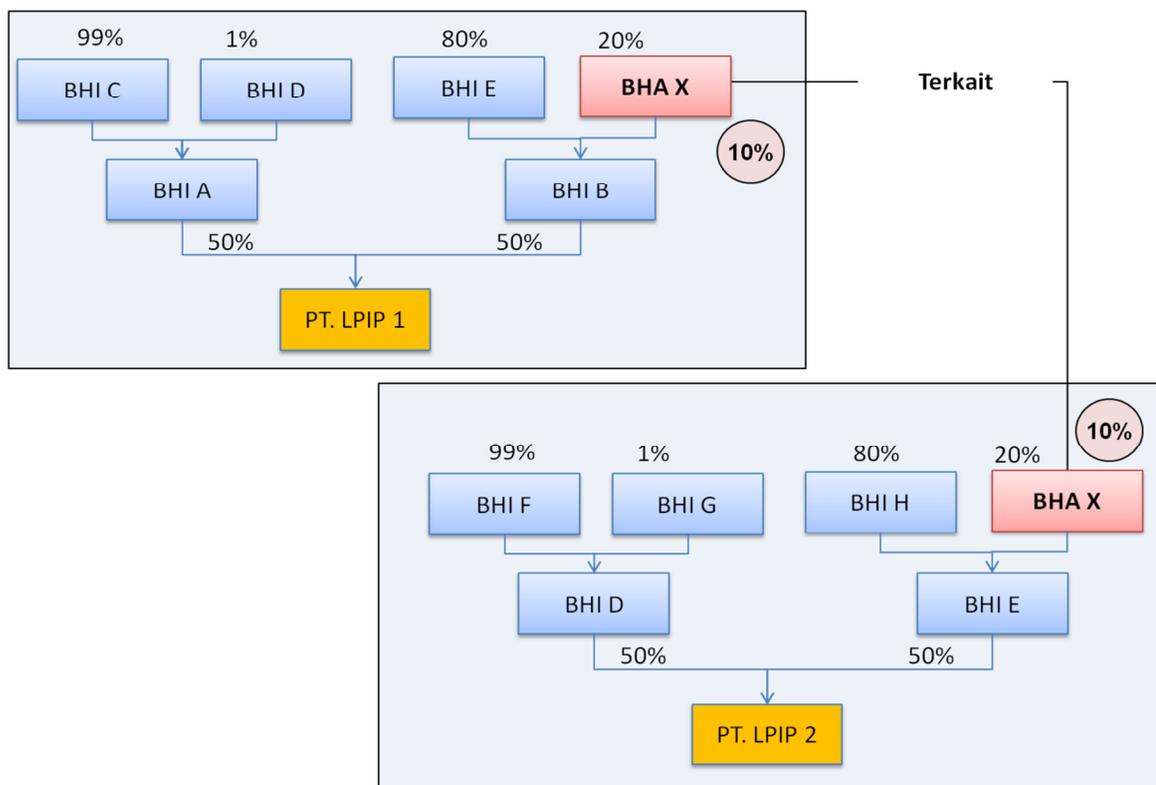
Ilustrasi A.4.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) pihak BHI yaitu BHI C yang menjadi pemilik di beberapa LPIP yaitu: di PT. LPIP 1 dan PT. LPIP 2. Besar kepemilikan BHI C di seluruh LPIP maksimal adalah 51%.
2. Besar kepemilikan BHI C di seluruh LPIP adalah:
 - a. Kepemilikan BHI C sebagai pemegang saham PT. LPIP 1 adalah:
 BHI C di PT. LPIP 1 = 21%
 - b. Kepemilikan BHI C di PT. LPIP 2 adalah:
 BHI C = (% kepemilikan BHI C di BHI E) dikali (% kepemilikan BHI E di PT. LPIP 2)
 = 60% x 50%
 = 30%

Total kepemilikan BHI C di seluruh LPIP adalah: 21% + 30% = 51%.

3. Total kepemilikan BHI C telah mencapai batas maksimal kepemilikan di seluruh LPIP (51%), maka BHI C tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP lainnya.

Ilustrasi A.4.2



Ilustrasi A.4.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) pihak asing, yaitu: BHA X yang menjadi pemilik di beberapa LPIP yaitu: di PT. LPIP 1 dan di PT. LPIP 2. Besar kepemilikan BHA X di seluruh LPIP maksimal adalah 20%.
 2. Besar kepemilikan BHA X di seluruh LPIP adalah:
 - a. Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 1

$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI B}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI B di PT. LPIP 1})$$

$$= 20\% \times 50\%$$

$$= 10\%$$
 Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 1 adalah 10%
 - b. Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 2

$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI E}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI E di PT. LPIP 2})$$

$$= 20\% \times 50\%$$

$$= 10\%$$
 Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 2 adalah 10%
- Total kepemilikan BHA X di seluruh LPIP adalah: $10\% + 10\% = 20\%$.
3. Total kepemilikan BHA X telah mencapai batas maksimal kepemilikan di seluruh LPIP (20%), maka BHA X tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP lainnya.

B. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Gubernur Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian LPIP dengan rencana nama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:

1. Rancangan akta pendirian Perseroan Terbatas, termasuk rancangan anggaran dasar;
2. Data kepemilikan berupa daftar masing-masing calon pemegang saham disertai dokumen yang dipersyaratkan;
3. Daftar susunan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan;
4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia;
5. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama;
6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
7. Rancangan sistem teknologi informasi yang akan digunakan;
8. Rancangan kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari Bank Indonesia;
9. Pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
10. Kebijakan dan prosedur operasional;
11. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. (.....) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. untuk pendirian LPIP yang merupakan % (..... perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

12. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan LPIP:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Demikian permohonan kami.

Nama dan tandatangan calon pemilik

(.....)

C. Contoh Surat Permohonan Izin Usaha LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :
Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada
Gubernur Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal : Permohonan Izin Usaha Lembaga Pengelola Informasi
Perkreditan (LPIP)

Menunjuk surat Bank Indonesia Nomor tanggal
..... perihal Persetujuan Prinsip LPIP dengan ini kami:

Nama LPIP :

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha LPIP. Untuk
melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan:

1. Akta pendirian LPIP, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. Daftar pemegang saham disertai dokumen yang dipersyaratkan;
3. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan;
4. Susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia *);
5. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama *);
6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang *);
7. Arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan;
8. Daftar kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari Bank Indonesia *);
9. Pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* *);
10. Kebijakan dan prosedur operasional;
11. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp.
(.....) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q.
..... sebagai pelunasan modal disetor minimum
..... yang merupakan % (..... perseratus) dari
total modal disetor minimum yang dipersyaratkan, dan telah berisi
keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
12. Fotokopi dokumen sebagai bukti pelunasan modal disetor dalam
bentuk lainnya (non tunai);
13. Bukti kesiapan operasional beserta dokumen yang dipersyaratkan;

14. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan LPIP:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) Hanya disampaikan apabila terdapat perubahan.

D. Contoh Laporan Penambahan Modal Disetor LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Laporan Penambahan Modal Disetor Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP)

Sehubungan dengan penambahan modal disetor LPIP, dengan ini kami sampaikan:

- ./.
1. Perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang pada tanggal sebagaimana *copy* terlampir.
 2. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham LPIP bahwa perubahan modal disetor:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Demikian agar maklum.

(Direksi)

(.....)

E. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan komposisi kepemilikan saham LPIP yang diakibatkan oleh penggantian/pengurangan/penambahan saham*) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Kepemilikan saham LPIP saat ini:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst.				
Total				

B. Rencana Kepemilikan saham LPIP yang baru:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst.				
Total				

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dari calon pemegang saham ./. sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

F. Contoh . . .

F. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) *)

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPIP *) sebagai berikut:

A. Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP *) saat ini:

No.	Nama Direksi dan/atau Dewan Komisaris *)	Jabatan
1.		
2.		
Dst.		

B. Rencana Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP *) yang baru:

No.	Nama Direksi dan/atau Dewan Komisaris *)	Jabatan
1.		
2.		
Dst.		

./.

Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

G. Contoh Perhitungan Biaya Perolehan Data

1. Komponen Perhitungan

Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan dan analisis, Bank Indonesia menetapkan besarnya komponen perhitungan Biaya Perolehan Data adalah sebagai berikut:

a. Contoh Biaya Pengelolaan Data : Rp900.000.000.000,00
(BPnD) (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
per bulan.

b. Contoh Jumlah LPIP : 3 (tiga) LPIP

c. Contoh Indeks Kategori Bisnis (IKB)

- 1) Komersial : 0,8
- 2) Ritel : 1
- 3) UMKM : 0,5
- 4) Campuran-UMKM : 0,6
- 5) Campuran-non UMKM : 0,7

d. Contoh Indeks Pengguna Informasi (IPI)

- 1) Bank Umum (BU) : 0,7
- 2) Non Bank Umum : 0,5
- 3) Campuran BU/non BU : 0,6

e. Contoh *Data Series* (DS)

Pada tahap awal, Bank Indonesia akan memberikan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir *data series* sebelum LPIP beroperasi.

Misal LPIP beroperasi pada bulan Januari 2015, maka *data series* yang akan diberikan adalah sebagai berikut

Data yang diberikan	Des 12	Jan13	...	Okt 14	Nov 14
Periode Pemberian Data	-	-	...	-	Des 14

f. Contoh Jumlah Bulan Data (N)

Jumlah bulan data dihitung untuk setiap periode bulan Januari, sehingga bagi LPIP yang memulai operasional tidak di bulan Januari, maka perhitungan jumlah bulan data untuk tahun pertama akan dihitung sampai dengan akhir tahun. Misalnya LPIP mulai beroperasi pada bulan September 2015, maka bulan data yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Data yang diberikan	Agt 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15
Periode Pemberian Data	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Des 15

Sehingga sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah bulan yang dihitung adalah 4 (empat). Tahun selanjutnya akan dimulai dari bulan Januari.

2. Contoh Kasus

- a. PT. LPIP ABC mulai beroperasi pada bulan Januari 2015 dengan fokus usaha khusus untuk mendukung penyediaan kredit ritel (misalnya kartu kredit). Adapun anggota LPIP yang memanfaatkan produk tersebut berasal dari Bank Umum yang ada di Indonesia. Besar biaya yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

Pada tahap awal operasi, Bank Indonesia menyediakan 24 bulan data series (data bulan Desember 2012 s.d November 2014, sehingga besar perolehan data awal yang dikenakan kepada LPIP adalah:

$$BPDA = \frac{BPnD \times IKB \times IPI \times DS}{Jml. LPIP}$$

BPnD : Rp900.000.000,00

IKB : Ritel (1)

IPI : Bank Umum (0,7)

DS : 24

Jml. LPIP : 3

$$BPDA = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 24}{3}$$

BPDA= Rp5.040.000.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).

2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

Biaya perolehan data berkala dihitung secara *annual* untuk setiap periode bulan Januari.

$$BPDB = \frac{BPnD \times IKB \times IPI \times N}{Jml. LPIP}$$

BPnD : Rp900.000.000,00

IKB : Ritel (1)

IPI : Bank Umum (0,7)

N : 12

(data bulan Desember 2014 s.d November 2015,
yang diberikan pada periode Januari s.d
Desember 2015)

Jml. LPIP : 3

$$BPDB = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 12}{3}$$

BPDB= Rp2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua
Puluh Juta Rupiah).

- b. Dengan contoh kasus yang sama pada nomor 1 (satu) di atas, apabila PT. LPIP ABC mulai beroperasi pada bulan September 2015, maka perhitungan biaya perolehan data adalah sebagai berikut:

1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

Tidak terdapat perubahan perhitungan mengingat variabel kategori bisnis, kriteria pengguna, maupun jumlah data series yang disediakan oleh Bank Indonesia adalah tetap. Sehingga besar biaya perolehan data awal adalah Rp5.040.000.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).

2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

Mengingat periode perhitungan biaya data berkala adalah setiap bulan Januari, maka LPIP yang beroperasi diluar bulan Januari akan diberlakukan secara prorata dengan perhitungan biaya perolehan data berkala sebagai berikut:

a) Contoh Biaya Data Berkala Tahun Pertama

$$BPDB = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 4}{3}$$

Komponen yang berubah adalah besarnya N (jumlah periode data yang disalurkan sampai dengan akhir tahun),

yaitu . . .

yaitu 4 (empat) terdiri dari data bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2015.

BPDB = Rp840.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

b) Contoh Biaya Data Berkala Tahun Selanjutnya

Perhitungan biaya data berkala untuk tahun selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan pada butir a. 2).

Besarnya biaya data berkala adalah Rp2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- c. Dengan contoh kasus yang sama pada nomor 1 (satu) di atas, apabila selain kepada Bank Umum, PT. LPIP ABC juga melayani BPR dan Perusahaan Pembiayaan, maka perhitungan besarnya biaya adalah sebagai berikut:

1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

$$BPDA = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,6 \times 24}{3}$$

IPI : Campuran BU dan Non BU (0,6)

BPDA = Rp4.320.000.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

$$BPDB = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,6 \times 12}{3}$$

BPDA= Rp2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

H. Format Penyampaian Laporan

H.1. Contoh Surat Penyampaian Laporan Bulanan

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Penyampaian Laporan Bulanan Periode ... (bulan-tahun)

./.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Periode ... (bulan-tahun)* sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

Lampiran Laporan Bulanan Periode ... (bulan-tahun)

1. Total Debitur (dirinci Debitur Perorangan dan Debitur Badan Usaha);
2. Total Nasabah (dirinci Debitur Perorangan dan Debitur Badan Usaha);
3. Total Fasilitas Penyediaan Dana (dirinci berdasarkan jenis fasilitas);
4. Total Lembaga Keuangan yang menjadi anggota (dirinci berdasarkan kategori kegiatan usaha);
5. Total non Lembaga Keuangan yang menjadi anggota (dirinci berdasarkan kategori kegiatan usaha);
6. Total permintaan Informasi Perkreditan oleh anggota (dirinci berdasarkan tujuan permintaan);
7. Total permintaan Informasi Perkreditan oleh masyarakat (dirinci berdasarkan tujuan permintaan);

Untuk nomor 1 s.d nomor 6 dapat disajikan dalam bentuk *series* (tabel dan/atau diagram) selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir.

8. Data penanganan pengaduan Debitur atau Nasabah
 - a. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh data pada Informasi Perkreditan:

	Jan
Total pengaduan yang sedang ditangani: a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan baru di bulan berjalan: a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan yang terbukti tidak valid a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan yang tidak terselesaikan di bulan berjalan a. Debitur b. Nasabah			

- b. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh penyampaian Informasi Perkreditan kepada Debitur atau nasabah yang tidak tepat;
- c. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh data Debitur atau nasabah tercampur dalam Informasi Perkreditan;
- d. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang menjadi gugatan hukum.

H. 2. Contoh Surat Penyampaian Laporan Semesteran

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Penyampaian Laporan Semesteran Periode Semester (I/II)*
tahun ...

./.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Semester (I/II)* tahun...
sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.
Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

H.3. Contoh Surat Penyampaian Laporan Tahunan

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Penyampaian Laporan Tahunan Periode Tahun ...

./.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun...
sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.
Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

H.4. Contoh Surat Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan Periode Tahun ...

./.
Bersama ini kami sampaikan Rencana Bisnis Tahunan Periode
Tahun... sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.
Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

I. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghentian izin usaha LPIP..... dengan alasan

././ Bersama ini kami sampaikan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha LPIP;
2. Laporan rencana dan alasan penghentian kegiatan usaha LPIP;
3. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban (*action plan*) LPIP;
4. Laporan keuangan terakhir; dan
5. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

J. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Grup Pengelolaan Informasi Perkreditan Nasional

Perihal: Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Lembaga
Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha (nama LPIP) sejak tanggal

./.
Bersama ini kami sampaikan laporan yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
2. Pelaksanaan pengumuman rencana pembubaran dan rencana penyelesaian kewajiban;
3. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban;
4. Laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban; dan
5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham mengenai penyelesaian kewajiban.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

PERRY WARJIYO